

**IDENTIFIKASI FAKTOR PENENTU
LOKASI INDUSTRI DI KOTA SEMARANG
DAN DAERAH YANG BERBATASAN**

TUGAS AKHIR

Oleh:
FAHRIAL FARID
L2D 098 429



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

ABSTRAK

Industrialisasi pada dasarnya merupakan indikasi perkembangan struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder. Aktivitas industri memberi dampak positif melalui penciptaan aktivitas-aktivitas ikutan yang memperluas daya serap tenaga kerja sekaligus memberi nilai tambah bagi perekonomian suatu daerah. Namun dalam perkembangannya, aktivitas industri terutama industri besar dan menengah secara spasial/lokasional bersifat selektif. Lokasi yang dipilih sebagai lokasi aktivitas industri merupakan lokasi yang secara ekonomis memberi keuntungan/laba maksimal melalui kombinasi berbagai faktor pertimbangan. Lokasi optimal dari sisi pelaku industri tersebut terutama didasarkan pada penghematan yang dapat diperoleh dalam melakukan aktivitas industri, baik aktivitas produksi maupun pemasaran komoditi hasil industri.

Proses tersebut di atas, jika terjadi secara konsisten akan menimbulkan fenomena pemusatan atau aglomerasi industri yang menjadi salah satu faktor penyebab disparitas antardaerah. Fenomena aglomerasi industri besar dan menengah biasanya memilih lokasi di kota-kota besar dan daerah sekitarnya. Hal ini telah dibuktikan oleh berbagai penelitian para ahli. Permasalahan menjadi semakin parah jika aglomerasi industri besar dan menengah berlangsung pada lokasi yang tidak diarahkan sebagai lokasi industri oleh pemerintah dengan pertimbangan daya dukung fisik alam.

Kota Semarang dan daerah yang berbatasan (Kabupaten Kendal, Demak, Semarang) merupakan salah satu lokasi aglomerasi industri. Aktivitas industri yang berpusat di Kota Semarang telah merembes ke daerah pinggiran hingga melingkupi daerah-daerah administrasi yang berbatasan dengannya pada lokasi-lokasi yang awalnya merupakan lahan pertanian dan kawasan resapan air (Suara Merdeka, 2 Mei 2003).

Fenomena sebagaimana diuraikan di atas mengindikasikan bahwa pelaku industri memiliki preferensi tertentu terhadap lokasi berkaitan dengan kombinasi berbagai faktor yang melekat pada suatu lokasi sehingga mampu memberikan nilai lebih bagi aktivitas industri berupa penghematan biaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu lokasi aktivitas industri menurut preferensi pelaku industri. Sementara itu, di sisi lain dalam menentukan arahan peruntukan lokasi industri, pemerintah terutama berkepentingan dengan pelestarian lingkungan. Dalam hal ini faktor-faktor penentu yang diidentifikasi juga dikaitkan dengan faktor-faktor pembatas berupa berbagai aturan normatif yang mengatur mengenai lokasi industri.

Penelitian ini dilakukan melalui analisis statistik deskriptif serta analisis pembobotan. Analisis pembobotan dilakukan untuk mengidentifikasi preferensi pelaku industri terhadap faktor-faktor pertimbangan pemilihan lokasi industri. Melalui analisis pembobotan, dapat dilakukan pemberian skor terhadap faktor lokasi sehingga mampu menggambarkan urutan prioritas faktor penentu lokasi industri menurut preferensi pelaku industri. Lokasi industri dibedakan menjadi dua, yaitu industri yang berada di dalam kawasan dan di luar kawasan industri. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya perbedaan tipologi faktor penentu lokasi industri antara kedua kawasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan baku dan pasar tidak lagi menjadi faktor penentu lokasi industri besar dan menengah. Dalam hal ini industri bersifat "footlose" terhadap faktor tersebut. Industri lebih berorientasi pada faktor infrastruktur transportasi sehingga dapat dikatakan sifat "footlose" industri berbanding lurus dengan kebutuhan terhadap infrastruktur transportasi. Orientasi terhadap infrastruktur transportasi memiliki tipologi yang berbeda antara industri di dalam dan di luar kawasan industri. Industri di dalam kawasan yang dominan berada di Kota Semarang lebih berorientasi pada Pelabuhan Laut Tanjung Emas sedangkan industri di luar kawasan berorientasi pada jalan raya yang menghubungkan daerah-daerah antarkota/kabupaten.

Prioritas faktor penentu berikutnya setelah infrastruktur transportasi adalah tenaga kerja. Aktivitas industri, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan menggunakan sekitar 70 % tenaga kerja lokal. Jika dikaitkan dengan pasokan tenaga kerja pada daerah penelitian, penduduk didominasi oleh tenaga kerja yang hanya tamatan SD. Namun aktivitas industri yang dominan bersifat padat karya memungkinkan penyerapan tenaga kerja masal tanpa menuntut keterampilan tinggi. Aktivitas industri dalam hal ini lebih berkepentingan pada tingkat upah yang murah. Upah murah tenaga kerja yang tidak berketerampilan tinggi merupakan daya tarik lokasi bagi aktivitas industri di wilayah penelitian. Hal ini membuktikan bahwa keunggulan komparatif dalam bentuk tenaga kerja murah masih menjadi andalan lokasi yang berfungsi efektif untuk membangkitkan aktivitas industri.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Umum

Industrialisasi pada dasarnya merupakan suatu peningkatan ke arah terbentuknya struktur ekonomi bangsa yang lebih kokoh. Hal ini senada dengan teori ekonomi pembangunan Rostow yang mengemukakan bahwa bangsa yang mencapai tahap perkembangan industrialisasi telah melampaui proses transformasi dari tahap tradisional/primer ke tahap industri/sekunder (Rostow dalam Jhingan, 1999 : 142).

Industrialisasi di Indonesia berkembang dengan hasil yang sangat signifikan sehingga secara struktural kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi telah melampaui sektor pertanian (sektor primer) yang sebelumnya menjadi sektor dominan. Proses transformasi sektor ekonomi dominan ini dibuktikan dengan pola pertumbuhan sektor ekonomi di Indonesia yang menunjukkan penurunan pada kontribusi sektor pertanian (sektor primer) dan peningkatan pada kontribusi sektor sekunder dan tersier. Pangsa sektor industri manufaktur terhadap total ekspor nonmigas telah melampaui peranan sektor pertanian sejak tahun 1987. Bahkan bila dibandingkan dengan negara-negara Asia Timur lainnya, Indonesia mengalami kenaikan ekspor manufaktur yang paling dramatis selama periode 1980-1995 (Ray dalam Kuncoro, 2002 : 6).

Dari Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa industrialisasi pada dasarnya merupakan kemajuan struktur ekonomi. Karena selain memberikan nilai tambah bagi Produk Domestik Bruto (PDB), aktivitas industri memiliki kemampuan yang signifikan dalam menyerap tenaga kerja.

Namun industrialisasi dalam perkembangannya merupakan suatu proses yang secara spasial memusat pada daerah-daerah tertentu dengan persebaran yang tidak merata. Survei di banyak negara menunjukkan bahwa industrialisasi secara geografis merupakan proses yang selektif (Hayter dalam Kuncoro, 2002 : 56).

Lokasi aktivitas industri terutama Industri Besar dan Menengah (IBM) di Indonesia, sebagaimana negara-negara berkembang lainnya memiliki pola yang memusat di dalam dan sekitar kota-kota besar terutama di pulau Jawa yang memiliki 82% dari total

distribusi industri manufaktur besar dan menengah di Indonesia (Kuncoro, 2002 : 56). Hal ini juga diperkuat oleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa industri manufaktur Indonesia cenderung terkonsentrasi secara spasial di Jawa sejak tahun 1970-an (Aziz dan Hill dalam Kuncoro, 2002 : 7). Namun bukan berarti di pulau Jawa sendiri aktivitas industri tersebar secara merata. Pola pemusatan aktivitas industri terutama IBM berdasarkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja di pulau Jawa terjadi pada daerah-daerah tertentu yang paling dominan diwakili oleh Jabotabek, Kota Surabaya, Kota Bandung dan Kota Semarang.

Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat daya tarik daerah perkotaan yang menawarkan kelengkapan dan kelayakan pelayanan fasilitas dan infrastruktur sekaligus menjadi pusat aktivitas pemerintahan. Selain itu daerah perkotaan juga selalu bercirikan jumlah penduduk yang besar. Besarnya jumlah penduduk ini dari kacamata pelaku industri merupakan potensi, baik sebagai pusat tenaga kerja maupun sebagai pasar bagi komoditi hasil industri. Fenomena inilah yang mendorong terjadinya kecenderungan pemusatan lokasi aktivitas industri pada daerah perkotaan. Daerah perkotaan tidak berarti mutlak di pusat kota, namun daerah pinggiran kota besar yang memiliki akses layak ke pusat kota juga menjadi lokasi incaran aktivitas industri. Hal tersebut juga didorong oleh semakin padatnya aktivitas di pusat kota yang berdampak pada meningkatnya harga lahan di pusat kota.

Pola pemusatan tersebut mengindikasikan bahwa pelaku industri sangat selektif dalam memilih lokasi industri yang berarti bahwa mereka memiliki preferensi mengenai lokasi industri. Permasalahan terjadi pada saat pola lokasi tersebut tidak sesuai atau menyimpang dari arahan peruntukan lokasi sehingga tidak lagi serasi dengan kepentingan yang lain seperti kelayakan fisik alam maupun aktivitas lain, terutama pertanian. Jika hal tersebut terjadi, terdapat dua hal sebagai fakta, pertama regulasi pemerintah dalam bentuk arahan peruntukan lokasi tidak berfungsi karena terjadi penyimpangan; kedua aktivitas industri akan mengorbankan kepentingan yang lain terutama keseimbangan alam dan aktivitas pertanian karena aktivitas industri menyerobot lahan yang berkaitan dengan dua kepentingan tersebut.

Kota Semarang serta daerah-daerah kota/kabupaten di sekitarnya merupakan salah satu sentra aktivitas industri. Pola lokasi aktivitas industri di Kota Semarang cenderung berkembang ke daerah luar kota, padahal lahan di luar kota semula merupakan lahan

pertanian dan kawasan hutan lindung/resapan air. Perembesan aktivitas Kota Semarang tersebut secara administrasi telah mencakup daerah Kabupaten Semarang, Kendal dan Demak. Di wilayah perbatasan Demak (Sayung, Mranggen) sebagian besar masih berupa lahan pertanian; Kendal (Kaliwungu) berupa hutan lindung dan pertanian; Kabupaten Semarang (Ungaran) berupa daerah hutan dan pertanian penyangga kawasan kota bawah (Suara Merdeka, 2 Mei, 2003).

Perkembangan aktivitas industri di wilayah ini telah mengancam kestabilan alam. Hal ini dibuktikan oleh pengembangan Kawasan Industri Candi di Kecamatan Ngaliyan, dengan membuka daerah resapan air sekitar 500 hektar untuk pembangunan kawasan industri sehingga menyimpan potensi banjir dan longsor. Awal pembangunan kawasan ini juga dilakukan dengan cara pengeprasan bukit (*cut and fill*) tanpa memperhatikan keseimbangan, dengan kemiringan hampir 90 derajat. Lokasi Kawasan Industri Candi terletak di belakang dan samping kanan lingkungan perumahan warga dengan jarak tidak lebih dari 50 meter. Aktivitas tersebut telah mengakibatkan rumah beberapa warga di Desa Desel dan Karonsih Selatan, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan menjadi rusak akibat dinding rumah yang retak. Selain itu, fasilitas umum seperti jalan juga mengalami longsor (Kompas, 2 Agustus, 2003).

Untuk mengantisipasi dampak negatif tersebut diperlukan peran pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengarahkan perkembangan lokasi industri. Dalam hal ini pemerintah memiliki instrumen regulasi melalui arahan lokasi peruntukan industri dalam RTRW untuk mengarahkan perkembangan lokasi industri. Dalam penentuan arahan tersebut, pemerintah harus mempertimbangkan preferensi pelaku industri terhadap lokasi industri. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkondisikan lokasi yang diarahkan sehingga mampu mengakomodasi preferensi pelaku industri terhadap lokasi industri. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan hal tersebut hanya akan berakibat pada tidak optimalnya pemanfaatan lokasi industri karena lokasi tersebut tidak menarik bagi pelaku industri sehingga para pelaku industri akan mencari lokasi lain yang berpotensi bagi terjadinya penyimpangan lokasi.

Dengan demikian diperlukan adanya suatu pedoman dalam penentuan arahan lokasi industri oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu lokasi industri yang mengakomodasi aspek daya dukung alam, aspek